

PROPOSAL USULAN KEGIATAN TAHUN 2019

BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA SETDA PROV. JATENG

PROGRAM : Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
KEGIATAN : Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Dan Perikanan
ANGGARAN : Rp. 200.000.000,-

1. LATAR BELAKANG.

Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi yang sangat strategis, karena disamping berbatasan dengan provinsi lain, Jawa Tengah juga diapit oleh Laut Jawa di sebelah Utara dan Samudera Hindia di sebelah Selatan, dengan panjang pantai 656,1 km. Dengan demikian memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Sehingga sumberdaya kelautan dan perikanan ini mempunyai kontribusi dalam perekonomian di wilayahnya. Secara sosial ekonomi sumberdaya ini memberikan multiplier efek yang cukup besar, antara lain : penyerapan tenaga kerja bagi para nelayan, sumber devisa, dan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Saat ini jumlah nelayan yang bergerak di usaha perikanan tangkap di laut Jawa Tengah sebanyak 160.396 orang, dengan infrastruktur pendukung antara lain : Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan, 9 (sembilan) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 77 buah Pusat Pendaratan Ikan (PPI) yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah.

Sedangkan fakta menunjukkan bahwa perikanan tangkap masih didominasi oleh skala kecil yang menjadi ciri dominan bagi perikanan tangkap di Jawa Tengah. Sebagian besar armada perikanan tangkap (81,23%) merupakan motor tempel berukuran kurang dari 10 GT berjumlah 15.026 unit, sehingga kemampuan jangkauan penangkapannya tidak bisa jauh atau hanya di sekitar pantai (jalur I). Terkonsentrasinya usaha penangkapan di sekitar pantai ini berakibat pada munculnya berbagai permasalahan, diantaranya : persaingan diantara sesama nelayan, potensi rawan konflik antar nelayan yang disebabkan perebutan daerah penangkapan (*fishing ground*), kerusakan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan disebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Polemik alat tangkap cantrang yang dilarang di Indonesia tertuang pada surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI) dan Surat Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPPNRI. Alasan dari penerapan aturan ini adalah alat tangkap tersebut termasuk dalam alat tangkap yang dapat merusak habitat ikan, dalam Permen tersebut menjelaskan nelayan wajib mengganti alat tangkap cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumberdaya ikan. lalu seperti apa alat tangkap cantrang itu?

Pengembangan perekonomian masyarakat pesisir juga memerlukan perhatian khusus utamanya terhadap petambak garam dalam rangka mendorong tercapainya swasembada garam nasional. Garam merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai strategis karena sangat dibutuhkan baik untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maupun untuk industri. Pada konsumsi, garam dimanfaatkan untuk rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Sedangkan pada industri, garam digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong untuk industri seperti : industri penyamakan kulit, industri tekstil, industri pulp, industri soda, industri kosmetik dan lain sebagainya.

Produksi garam di Jawa Tengah yang meliputi 5 (lima) Kabupaten yaitu Brebes, Demak, Jepara, Pati dan Rembang mencapai 307.249,18 ton dan posisi 5 (lima) tahun terakhir tertinggi pada tahun 2015 mencapai 841.543,56 ton itupun belum dapat mencukupi rata-rata kebutuhan garam di Jawa Tengah utamanya kebutuhan garam untuk farmasi (100% impor). Data kebutuhan garam tahun 2017 meliputi : garam halus 1.832.695,90 kg/tahun, garam bata 18.096,00 kg/tahun, garam kristal 156.000,00 kg/tahun, garam krosok 4.430.970,00 kg/tahun sedangkan garam farmasi 2.088,36 kg/tahun (100% impor) total 6.439.850,16 kg/tahun, oleh sebab itu untuk mendorong kecukupan kebutuhan garam di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi berupaya mendirikan pabrik garam di sentra-sentra produksi garam.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang terkait dengan penggantian alat tangkap ramah lingkungan, pembenahan perijinan kapal nelayan, ukur ulang kapal nelayan, validasi data nelayan dan kapal nelayan, serta pemberdayaan ekonomi di sektor pesisir, maka perlu dilakukan koordinasi lintas sektor, pendampingan, pembinaan yang berkelanjutan serta sinergitas kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk itu guna mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang bersifat lintas sektoral di bidang kelautan dan perikanan, maka sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah, dialokasikan kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan.

2. Maksud dan Tujuan

2.1. Maksud Kegiatan

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka penyiapan bahan dan rumusan ringkas dalam penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder.

2.2. Tujuan Kegiatan

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembinaan pengembangan bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder dalam rangka penyusunan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.

3. SASARAN

Nelayan, Puskud, TPI, PPP, UPR, BBI, Kelompok Pembudidaya, Masyarakat Pesisir, Pengusaha, OPD Provinsi dan Kab/Kota

4. KELUARAN (OUTPUT)

- Penyusunan KAK / TOR : 3 Laporan
- Konsultasi ke Pusat : 3 Kali
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan : 35 Kab/Kota
- Pelaksanaan Rakor : 2 Kali
- Pelaksanaan orientasi lapangan ke lokasi percontohan : 1 Kali
- Penyusunan laporan akhir : 3 Laporan

5. MANFAAT (OUTCOME)

Tersusunnya 2 rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan, yaitu :

- a. Kebijakan Sistem Kartu Nelayan Terintegrasi
- b. Kebijakan Pergaram di Jawa Tengah

6. DAMPAK (IMPACT)

1. Penyederhanaan perijinan kapal nelayan untuk kesejahteraan nelayan Jawa Tengah
2. Stabilitas harga garam di tingkat petambak garam.

7. RENCANA PENGANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Semarang, 2018

KEPALA BAGIAN KPKPP



Ir. DIAH KUSUMARINI, MSi
NIP. 19600404 198703 2 009